

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Gencarnya pengembangan dan pembangunan di Indonesia dewasa ini harus didukung oleh pembiayaan yang memadai. Pembiayaan tersebut salah satunya bersumber dari sektor pajak. Pajak merupakan alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari orang pribadi maupun badan, guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Pajak memberikan sumbangan terbesar bagi penerimaan negara dibandingkan dengan penerimaan bukan pajak seperti: penerimaan sumberdaya alam, bagian laba BUMN, penerimaan bukan pajak lainnya dan pendapatan badan layanan umum serta hibah.

Perusahaan merupakan salah satu subjek pajak penghasilan, yaitu subjek pajak badan.

Menurut Mardiasmo:

**”Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dalam nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.”<sup>1</sup>**

Banyak perusahaan atau wajib pajak yang melakukan perlawanan aktif secara langsung kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak, dalam bentuk *tax avoidance* yaitu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang dan dalam bentuk *tax evasion* yaitu meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

---

<sup>1</sup>Mardiasmo, **Perpajakan**, Edisi Revisi: ANDI OFFSET, Yogyakarta, 2013, hal. 23.

Tetapi, walaupun begitu tidaklah berarti bahwa pajak tidak dapat di kendalikan. Jika dipahami dengan baik ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan serta perkembangan dan perubahannya, maka pada hakikatnya pajak dapat disiasati dengan baik. Manajemen memegang peranan penting dalam memilih strategi yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan kekayaan para pemegang saham. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan kinerja perusahaan menjadi lebih baik dan efisien. Manajemen berkewajiban memanfaatkan sumberdaya perusahaan secara efisien dan meningkatkan pekerjaan perusahaan sehingga nilai perusahaan meningkat. Manajemen dapat memilih strategi manajemen pajak yang bermanfaat bagi perusahaan dalam jangka panjang. Manajemen pajak harus dilakukan dengan baik agar tidak menjurus kepada pelanggaran norma perpajakan atau penghindaran pajak. Manajemen pajak dapat dilakukan oleh perusahaan untuk menekan serendah mungkin kewajiban pajaknya. Manajemen perpajakan adalah suatu strategi manajemen untuk mengendalikan, merencanakan, mengorganisasikan aspek-aspek perpajakan dari sisi yang dapat menguntungkan nilai bisnis perusahaan dengan tetap melaksanakan kewajiban perpajakan secara peraturan dan perundang-undangan. Menurut Pohan dalam Achmad Zein Ridlwan:

**“Manajemen pajak adalah usaha menyeluruh yang dilakukan tax manager dalam suatu perusahaan atau organisasi agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dari perusahaan atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien dan ekonomis, sehingga memberi kontribusi maksimum bagi perusahaan.”<sup>2</sup>**

Adanya perbedaan kepentingan dan keinginan antara fiskus dan wajib pajak badan dalam pembayaran pajak, perusahaan dapat memaksimalkan manajemen pajaknya yaitu dengan cara memaksimalkan *tax insentive* dan memanfaatkan fasilitas perpajakan serta memperlakukan biaya yang menghemat pajak untuk memaksimalkan manajemen pajak perusahaan.

---

<sup>2</sup>Achmad Zein Ridlwan, Analisis Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Pajak dengan Indikator Tarif Pajak Efektif, 2016, hal. 1.

Penjelasan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 pasal 2 ayat (1) huruf b menjelaskan bahwa subjek pajak badan adalah:

**“Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap lainnya.”<sup>3</sup>**

Perusahaan ketika menerima atau memperoleh penghasilan akan merubah status perpajakannya menjadi wajib pajak dan akan dikenai pajak penghasilan. Penjelasan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 pasal 1 menurut Darmadi dalam Yuda Aditya Prakosomenjelaskan bahwa:

**“Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.”<sup>4</sup>**

Penghasilan kena pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dikenakan tarif sebesar 25% mulai 1 januari 2010. Untuk perseroan terbuka mendapatkan pengurangan tarif sebesar 5%. Dalam undang-undang No.36 tahun 2008 pasal 17 ayat (2b) dan peraturan pemerintah No.18 tahun 2007 pasal 2 menjelaskan bahwa wajib pajak dalam negeri berbentuk perseroan terbuka jika jumlah kepemilikan saham publiknya 40% atau lebih dari keseluruhan saham yang disetor. Jadi tarif pajak untuk perseroan terbuka sebesar 20% dari penghasilan kena pajak. Perusahaan dikatakan efektif melakukan pembayaran pajak. Ini biasanya disebabkan karena perusahaan kurang memanfaatkan fasilitas, peraturan dan biaya yang dapat menghemat pajak penghasilan. Semakin rendah nilai tarif pajak efektif semakin baik nilai tarif pajak efektif suatu

---

<sup>3</sup> Iqbal Nul Hakim Darmadi, **“Analisis faktor yang mempengaruhi manajemen pajak dengan indikator tarif pajak efektif”**, Skripsi S1 Fakultas Ekonomika dan Bisnis UNDIP, 2013, hal. 1.

<sup>4</sup> Yuda Aditya Prakoso, **Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tarif Pajak Efektif Pada Wajib Pajak Badan (Studi pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2016)**, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 2018, hal 2.

perusahaan dan semakin baiknya nilai tarif pajak efektif tersebut menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah berhasil melakukan perencanaan pajak.

Secara umum motivasi dilakukannya perencanaan pajak adalah untuk memaksimalkan laba setelah pajak dengan menggunakan tarif pajak efektif. Tarif pajak efektif pada dasarnya adalah sebuah persentasi besaran tarif pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Menurut Rachmitasari dalam Yuda Aditya Prakoso:

**“Tarif pajak efektif dihitung atau dinilai berdasarkan pada informasi keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan sehingga tarif pajak efektif merupakan bentuk perhitungan tarif pajak pada perusahaan. Tarif pajak efektif adalah perbandingan antara pajak riil yang kita bayar dengan laba komersial sebelum pajak.”<sup>5</sup>**

Contohnya, pada tahun 2011 PT. Tiga Pilar Sejahtera Food memiliki jumlah laba sebelum pajak penghasilan sebesar Rp.33.920.559.096 dan memiliki jumlah beban pajak sebesar Rp.8.848.004.551. Dengan demikian tarif pajak efektif perusahaan tersebut sebesar 26,08%, yaitu hasil dari perbandingan antara beban pajak dan laba sebelum pajak. Perusahaan dikatakan efektif melakukan pembayaran pajak jika tarif pajak perusahaan itu dibawah 20% dan jika diatas 20% berarti perusahaan kurang efektif dalam melakukan pembayaran pajak. Tarif pajak efektif digunakan untuk mengukur dampak perubahan kebijakan perpajakan atas beban pajak perusahaan.

Ada beberapa carapupaya suatu perusahaan dapat memaksimalkan manajemen pajaknya, yaitu dengan cara memaksimalkan *tax insentive*. Memanfaatkan ukuran perusahaan dapat menjadi salah satu cara untuk mendapatkan insentif pajak. Selain dengan memanfaatkan ukuran perusahaan, perusahaan juga dapat menekan tingkat profitabilitas yang digambarkan oleh *Return Of Assets (ROA)* untuk memaksimalkan manajemen pajak perusahaan. Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi akan dikenai pajak yang tinggi.

---

<sup>5</sup>Yuda Aditya Prakoso, **Op.Cit.**, 2018, hal. 4.

Penelitian lain menemukan bahwa besarnya profitabilitas perusahaan dapat mengurangi beban pajak perusahaan. Penyebabnya adalah karena perusahaan dengan tingkat efisiensi yang tinggi dan yang memiliki pendapatan tinggi cenderung menghadapi beban pajak yang rendah. Rendahnya beban pajak perusahaan dikarenakan perusahaan dengan pendapatan yang tinggi berhasil memanfaatkan keuntungan dari adanya insentif pajak dan pengurang pajak yang lain yang dapat menyebabkan tarif pajak efektif perusahaan lebih rendah dari yang seharusnya. Dengan adanya perbedaan antara teori dan hasil penelitian yang ada, maka diperlukan untuk mengatasi permasalahan ini.

Iqbal Nul Hakim Darmadimengatakan “**Undang-undang No.36 tahun 2008 pasal 10 ayat (6) menjelaskan bahwa persediaan barang dibagi menjadi 3 (tiga) golongan barang yaitu barang jadi atau barang dagangan, barang dalam proses produksi, bahan baku dan bahan pembantu.**”<sup>6</sup>Penilaian persediaan dalam perpajakan berbeda dengan yang diatur dalam PSAK No.4 (Revisi 2008). Adanya perbedaan dalam menilai persediaan menurut akuntansi dan pajak diperlukan adanya penyesuaian seperlu untuk diakui sebagai nilai persediaan. Besarnya intensitas persediaan dapat menimbulkan biaya tambahan dalam mengurangi laba perusahaan. Biaya tambahan tersebut akan mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan perusahaan. Penurunan pembayaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan yang disebabkan adanya hubungan linear antara laba perusahaan dengan pajak yang dibayarkan oleh perusahaan.

Hutang juga dapat mengurangi pajak dikarenakan adanya biaya bunga yang timbul dari hutang yang dimiliki oleh perusahaan dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan. Dengan adanya bunga hutang perusahaan akan lebih memilih menggunakan hutang dalam pembiayaan.

Berdasarkan faktor-faktor yang telah dipaparkan, peneliti tertarik untuk mengambil judul **“ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MANAJEMEN PAJAK DENGAN**

---

<sup>6</sup>**Tbid**, 2013, hal. 5.

## **INDIKATOR TARIF PAJAK EFEKTIF(Studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2017).**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Dari faktor-faktor yang dapat digunakan untuk memaksimalkan kinerja manajemen pajak perusahaan, maka rumusan masalah yang diungkap dalam penelitian ini adalah:

- a. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen pajak perusahaan?
- b. Apakah profitabilitas perusahaan berpengaruh terhadap manajemen pajak perusahaan?
- c. Apakah intensitas persediaan perusahaan berpengaruh terhadap manajemen pajak?
- d. Apakah tingkat hutang perusahaan berpengaruh terhadap manajemen pajak perusahaan?

### **1.3 Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan juga rumusan masalah diatas, maka penulis membatasi penelitian ini hanya pada faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen pajak dari sisi ukuran perusahaan, profitabilitas perusahaan, intensitas persediaan dan tingkat hutang perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh yang ditimbulkan oleh ukuran perusahaan terhadap manajemen pajak perusahaan.

2. Untuk menganalisis pengaruh yang ditimbulkan oleh profitabilitas terhadap manajemen pajak perusahaan.
3. Untuk menganalisis pengaruh yang ditimbulkan oleh intensitas persediaan terhadap manajemen pajak perusahaan.
4. Untuk menganalisis pengaruh yang ditimbulkan oleh hutang perusahaan terhadap manajemen pajak.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi pembuat kebijakan perpajakan agar dapat lebih memperhatikan hal-hal yang bisa digunakan oleh perusahaan dalam rangka manajemen pajak yang dapat mengurangi pendapatan negara dari sektor pajak.
2. Bagi perusahaan agar dapat lebih berhati-hati dalam melakukan manajemen pajak agar tidak digolongkan dalam penyelundupan pajak.
3. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat menjadi literatur dan dapat membantu bagi penelitian yang berhubungan dengan faktor yang mempengaruhi efektivitas manajemen pajak.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Pengertian Pajak**

Definisi atau pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro dalamMardiasmo:

**“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”<sup>7</sup>**

---

<sup>7</sup>Mardiasmo, **Op.Cit.**,2013, hal. 1.

Pengertian pajak ada bermacam-macam, yang lain dikemukakan oleh para sarjana, yang oleh Santoso Brotodhardjo dalam Adrian Sutedi salah satunya ialah **“Definisi Leroy Beaulieu berbunyi: pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak, yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang, untuk menutup belanja pemerintah.”**<sup>8</sup> Pengertian pajak menurut Anastasia Diana dan Lilis Setiawati :

**“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”**<sup>9</sup>

Sedangkan menurut MJH. Smeets dalam Sukrisno Agoes mendefenisikan pajak yaitu:

**“Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.”**<sup>10</sup>

Pengertian lainnya menurut *Ray M. Sommerfeld et al.* dalam Siti Kurni Rahayu:

**“Pajak adalah suatu pengalihan 10 er dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapatkan imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.”**<sup>11</sup>

## 2.1.2 Manajemen Pajak

Menurut Chairil Anwar Pohan:

**“Manajemen perpajakan adalah upaya menyeluruh yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi maupun badan usaha melalui proses perencanaan, pelaksanaan (implementasi) dan pengendalian kewajiban dan hak perpajakannya, agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dari orang pribadi, perusahaan, atau**

---

<sup>8</sup> Adrian Sutedi, **Hukum Pajak**, Cetakan 3, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal. 4.

<sup>9</sup> Anastasia Diana dan Lilis Setiawati, **PERPAJAKAN, Teori dan Peraturan Terkini: ANDI OFFSET**, Jakarta, 2014, hal. 1.

<sup>10</sup> Sukrisno Agoes, **AKUNTANSI PERPAJAKAN EDISI 3: Salemba Empat**, Jakarta, 2014, hal. 6.

<sup>11</sup> Siti Kurnia Rahayu, **PERPAJAKAN: (Konsep dan Aspek Formal)**, Cetakan Pertama, Rekayasa Sains: Bandung, 2017, hal. 26.

**organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien, dan efektif sehingga dapat memberikan kontribusi maksimum bagi perusahaan dalam artian peningkatan laba atau penghasilan.”<sup>12</sup>**

Manajemen pajak juga bagian integral dari perencanaan strategis perusahaan yang seharusnya sudah dimulai sebelum suatu usaha dimulai. Pelaksanaan manajemen perpajakan harus ekonomis, efisien, dan efektif. Menurut Permatasari dalam Liani Fatni Suarningrat dan Putu Ery Setiawan:

**”Manajemen pajak merupakan suatu pengelolaan kewajiban perpajakan perusahaan agar kewajiban perpajakan perusahaan dapat dilakukan dengan benar sesuai perundang-undangan perpajakan yang berlaku, agar jumlah pajak yang terutang dapat diminimalkan seefisien mungkin untuk bisa mendapatkan keuntungan yang diharapkan dengan tidak melakukan upaya-upaya pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang dapat menimbulkan sanksi perpajakan.”<sup>13</sup>**

Pengertian lain manajemen pajak yang dijelaskan oleh Iim Ibrahim Nur: **“Manajemen pajak adalah aktivitas yang dilakukan oleh suatu fungsi untuk merencanakan, mengumpulkan data dan memenuhi kewajiban perpajakan.”<sup>14</sup>** Tujuan manajemen pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu menerapkan dengan benar segala ketentuan perpajakan dan upaya efisiensi pajak penghasilan untuk dapat mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya. Tujuan manajemen pajak dapat tercapai dengan cara menerapkan secara efektif fungsi-fungsi manajemen pajak, yang meliputi *tax planing*, *tax implementation*, dan *tax control*.

Chairil Anwar Pohan Menjelaskan bahwa motivasi adanya manajemen pajak tidak hanya berasal dari perusahaan yang ingin menekan beban pajaknya, tetapi juga ada motivasi yang berasal dari beberapa unsur yaitu:

- 1. Tingkat kerumitan suatu perusahaan (*complexity of rule*)  
Makin rumit peraturan perpajakan, muncul kecenderungan wajib pajak untuk menghindarinya karena biaya untuk mematuhi menjadi tinggi.**

---

<sup>12</sup>Chairil Anwar Pohan, **MANAJEMEN PERPAJAKAN: Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis:** Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013, hal. 18.

<sup>13</sup>Liana Fatni Suarningrat dan Putu Ery Setiawan, **“Manajemen Pajak Sebagai Upaya Untuk Efisiensi Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan”**, 2013, hal. 294.

<sup>14</sup>Iim Ibrahim Nur, **“Analisis Manajemen Pajak Pada Industri Penyedia Jasa Telekomunikasi”**, Ultima Management, 2010, hal. 59.

2. **Besarnya pajak yang dibayar (*Tax required to pay*)**  
Makin besar jumlah pajak yang harus dibayar, akan makin besar pula kecenderungan wajib pajak untuk melakukan kecurangan dengan cara memperkecil jumlah pembayaran pajaknya.
3. **Biaya untuk negosiasi (*Cost of bribe*)**  
Disengaja atau tidak, terkadang wajib pajak melakukan negosiasi dan memberikan uang sogokan kepada fiskus dala pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya. Makin tinggi uang sogokan yang dibayarkan, semakin kecil pula kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.
4. **Risiko deteksi (*Probability of detection*)**  
Risiko deteksi ini berkaitan dengan tingkat probabilitas apakah pelanggaran ketentuan perpajakan ini akan terdeteksi atau tidak. Makin rendah risiko terdeteksi, wajib pajak cenderung untuk melakukan pelanggaran. Sebaliknya, bila suatu pelanggaran mudah diketahui, wajib pajak akan memilih posisi konservatif dengan tidak melanggar aturan.
5. **Besarnya denda (*Size of penalty*)**  
Makin berat sanksi perpajakan yang bisa dikenakan, maka wajib pajak akan cenderung mengambil posisi konservatif dengan tidak melanggar ketentuan perpajakan. Sebaliknya makin ringan sanksi atau bahkan ketiadaan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan wajib paja, maka kecenderungan untuk melanggar akan lebih besar.
6. **Moral masyarakat**  
Moral masyarakat akan memberi warna tersendiri dalam menentukan kepatuhan dan kesadaran mereka dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.<sup>15</sup>

Menurut Iqbal Nul Hakim, Cara meneliti manajemen pajak yang dilakukan oleh perusahaan adalah dengan menggunakan tarif pajak efektif. Secara umum motivasi dilakukannya manajemen pajak adalah untuk memaksimalkan laba setelah pajak dengan menggunakan tarif pajak efektif. Menurut Richardson dan Lanis dalam Scania Evana Putri:

**"Tarif pajak efektif sebagai beban pajak penghasilan dibagi oleh pendapatan sebelum pajak."**<sup>16</sup> Digunakannya tarif pajak efektif sebagai indikator adanya manajemen pajak karena tarif pajak efektif memberikan gambaran insentif pajak dari pemerintah. Dengan adanya tarif pajak efektif, maka perusahaan akan mendapatkan gambaran secara riil bagaimana usaha

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, 2013, hal. 18.

<sup>16</sup> Scania Evana Putri, **Pengaruh Ukuran Perusahaan, Return on Asset (ROA), Leverage dan Intensitas Modal Terhadap Tarif Pajak Efektif (Studi empiris pada perusahaan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2013)**, JOM Fekon, 2016, hal. 1509.

manajemen pajak perusahaan dalam menekan kewajiban pajak perusahaan. Karena apabila perusahaan memiliki persentase tarif pajak efektif yang lebih tinggi dari tarif yang ditetapkan yaitu sebesar 20% maka perusahaan kurang maksimal dalam memaksimalkan insentif-insentif perpajakan yang ada, karena dengan perusahaan memanfaatkan insentif perpajakan yang ada maka dapat memperkecil persentase pembayaran pajak dari laba komersial. Tarif pajak efektif merupakan proksi yang paling banyak digunakan pada penelitian terdahulu. Tarif pajak efektif telah menjadi cara umum untuk meringkas sistem pajak perusahaan dengan statistik yang sederhana dan sering digunakan oleh para pembuat kebijakan.

### 2.1.3 Teori Agensi

Menurut Eisenhardt dalam Harmono menyatakan bahwa:

**Teori keagenan (agency theory) dapat menjelaskan kesenjangan antara manajemen sebagai agent dan para pemegang saham sebagai principal atau pendelegator. Dalam hal ini, principal yang mendelegasikan pekerjaan kepada pihak lain sebagai agen untuk melaksanakan tugas pekerjaan. Teori keagenan menunjukkan bahwa kondisi informasi yang tidak lengkap dan penuh ketidakpastian akan memunculkan masalah keagenan, yaitu adverse selection dan moral hazard.<sup>17</sup>**

Hubungan keagenan sebagai suatu kontrak dimana satu atau lebih principal menggunakan pihak lain atau agen untuk melakukan sejumlah jasa dan memberikan wewenang dalam pengambilan keputusan. Dalam pelaksanaan kontrak akan timbul biaya agensi (*Agency cost*), yaitu biaya yang timbul agar manajer bertindak selaras dengan tujuan pemilik, seperti pembuatan kontrak ataupun melakukan pengawasan. Timbulnya manajemen pajak sangat dipengaruhi oleh *agency problem*.

Dalam penelitian ini, manajemen perusahaan sebagai agen atau pihak yang diberi wewenang atas kegiatan perusahaan dan berkewajiban menyediakan laporan keuangan, cenderung akan memanfaatkan kesempatan yang dimiliki untuk menekan beban pajak

---

<sup>17</sup>Harmono, **MANAJEMEN KEUANGAN** Berbasis Balanced Scorecard Pendekatan Teori, Kasus, dan Riset Bisnis: Bumi Aksara, Jakarta, 2017, hal. 3.

perusahaan. Sementara pemerintah atau fiskus sebagai principal menginginkan penerimaan pajak yang sebesar-besarnya dari pemungutan pajak. Dari perbedaan kepentingan yang terjadi antara agen dan principal tersebut yang menyebabkan konflik antara fiskus sebagai pemungut pajak dengan pihak manajemen perusahaan sebagai pembayar pajak.

#### **2.1.4 Ukuran Perusahaan**

Menurut Darmadi dalam Septi Imelia **“Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar atau kecil perusahaan menurut berbagai cara, antara lain: Total aktiva, log size, nilai pasar saham, dan lain-lain.”**<sup>18</sup> Perusahaan besar adalah perusahaan yang memiliki total aset dalam jumlah besar, untuk perusahaan yang memiliki total aset yang lebih kecil dari perusahaan besar maka dapat dikategorikan dalam perusahaan menengah, dan yang memiliki total aset jauh dibawah perusahaan besar dapat dikategorikan sebagai perusahaan kecil. Ada dua cara penghitungan nilai kekayaan perusahaan yaitu dengan melihat total aktiva atau nilai perusahaan. Total aktiva adalah total nilai buku dan aktiva menurut catatan akuntansi dan total nilai perusahaan adalah total nilai pasar seluruh komponen struktur keuangan.

Perusahaan yang termasuk dalam perusahaan besar cenderung memiliki sumberdaya yang lebih besar dibandingkan perusahaan yang memiliki skala lebih kecil untuk melakukan manajemen pajak. Sumber daya manusia yang ahli dalam perpajakan diperlukan agar manajemen pajak yang dilakukan oleh perusahaan dapat maksimal untuk menekan biaya pajak perusahaan, sedangkan perusahaan berskala kecil tidak dapat optimal dalam manajemen pajak dikarenakan kekurangan ahli dalam perpajakan. Dengan banyaknya sumber yang dimiliki oleh

---

<sup>18</sup>Septi Imelia, **Analisis Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Pajak dengan Indikator Tarif Pajak Efektif (ETR) Pada Perusahaan LQ45 Yang Terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2012**, Faculty of Economics Riau University, 2015, hal. 6.

perusahaan berskala besar maka akan semakin besar biaya pajak yang dapat diminimalisir oleh perusahaan.

### 2.1.5 Profitabilitas

Menurut Rodriguez dan Arias dalam Yuda Aditya Prakoso pengertian profitabilitas adalah:

**Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba atau keuntungan dan merupakan indikator dari keberhasilan suatu perusahaan. Profitabilitas merupakan faktor penentu beban pajak, karena perusahaan dengan laba yang lebih besar pula. Sebaliknya, perusahaan dengan tingkat laba yang rendah maka akan membayar pajak yang lebih rendah atau bahkan tidak membayar pajak jika perusahaan mengalami kerugian. Dengan sistem kompensasi pajak, kerugian dapat mengurangi besarnya pajak yang harus dibayar pada tahun berikutnya.<sup>19</sup>**

Laba akuntansi merupakan selisih pengukuran pendapatan dan biaya. Pengertian pendapatan dalam akuntansi keuangan adalah peningkatan jumlah aktiva atau penurunan kewajiban suatu organisasi akibat dari penjualan barang dan atau jasa kepada pihak lain dalam periode akuntansi tertentu. Selisih antara pendapatan yang diterima oleh perusahaan akan dikurangkan dengan biaya untuk melihat kinerja perusahaan, apakah mendapatkan laba atau merugi dari kegiatan usaha perusahaan.

Ketika perusahaan telah mengalami laba, maka dapat dikatakan bahwa manajemen telah bekerja dengan baik dalam memaksimalkan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan lebih besar daripada biaya yang diperlukan untuk mendapatkan pendapatan. Pengukuran efektifitas pengelolaan sumberdaya perusahaan dengan pendapatan yang diterima atau yang sering disebut profitabilitas perusahaan dapat dilakukan dengan menghitung pendapatan yang dihasilkan

---

<sup>19</sup> Yuda Aditya Prakoso, **Op.Cit.**, 2018, hal.15.

dengan total asset yang ada dalam perusahaan. Dalam akuntansi dikenal beberapa rasio profitabilitas:

1. Rasio margin (*profit margin-PM*)

Meningkatnya *profit margin* mengindikasikan bahwa perusahaan mampu menghasilkan laba bersih yang lebih tinggi dari aktivitas penjualannya.

2. Rasio kemampuan dasar menghasilkan laba (*basic earning power ratio/operating return on asset(OROA)*)

*Earning before interest and tax* merupakan laba murni perusahaan yang belum dipengaruhi keputusan keuangan (utang) dan pajak.

3. Tingkat pengembalian atas total aktiva (*Return On Asset (ROA)*)

*Return on assets* digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang berasal dari aktivitas operasi.

4. Rasio atas tingkat pengembalian ekuitas (*Return On Equity (ROE)*)

*Return on equity* merupakan alat ukur terakhir untuk mengukur profitabilitas perusahaan. ROE menggambarkan keberhasilan perusahaan menghasilkan laba untuk para pemegang saham.

### 2.1.6 Intensitas persediaan

Menurut Iqbal Nulhakim Darmadi **“Persediaan adalah bahan atau barang yang disimpan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu.”**<sup>20</sup> Persediaan dibagi menjadi beberapa bentuk:

1. Persediaan bahan mentah

---

<sup>20</sup>Ibid, 2013, hal. 22.

Persediaan bahan mentah biasa dijumpai pada perusahaan yang bergerak dalam bidang industry. Persediaan bahan mentah yang ada dalam perusahaan nantinya akan diolah menjadi persediaan bahan jadi yang mempunyai nilai ekonomis lebih tinggi dari persediaan bahan mentah yang tujuannya untuk dijual oleh perusahaan sehingga perusahaan mendapatkan laba dari proses produksi.

2. Persediaan bahan pembantu

Persediaan bahan pembantu adalah persediaan bahan yang memiliki kegunaan untuk membantu proses produksi.

3. Persediaan bahan dalam proses

Persediaan bahan dalam proses adalah persediaan yang membutuhkan proses lebih lanjut sehingga akan didapatkan persediaan bahan jadi yang mempunyai nilai ekonomis yang lebih tinggi.

4. Persediaan barang jadi

Persediaan barang jadi merupakan hasil akhir dari proses produksi.

5. Persediaan suku cadang

Persediaan suku cadang adalah persediaan yang diperlukan agar proses produksi suatu perusahaan tidak terganggu, contoh persediaan suku cadang antara lain rantai dan gear yang digunakan dalam mesin untuk kegiatan produksi.

Perusahaan tidak boleh terlalu banyak menyimpan persediaan karena persediaan hanyalah suatu sumber dana yang menganggur, karena sebelum persediaan digunakan maka sumber dana

yang terikat didalamnya tidak dapat digunakan untuk keperluan yang lain. Investasi persediaan yang dilakukan oleh perusahaan dapat diukur dengan rasio perbandingan antara jumlah persediaan dengan total aset. Rasio ini dapat digunakan untuk analisis apakah investasi perusahaan terhadap persediaan telah sesuai dengan kebutuhan atau malah terjadi pemborosan.

Beberapa fungsi dari persediaan :

1. Menghilangkan risiko keterlambatan pengiriman bahan baku atau barang yang diperlukan oleh perusahaan.
2. Menghilangkan risiko jika material yang dipesan tidak baik sehingga harus dibalikan.
3. Menghilangkan risiko terhadap kenaikan harga barang atau inflasi.
4. Untuk menyimpan bahan baku yang dihasilkan secara musiman sehingga persediaan tidak akan kesulitan jika bahan baku tidak tersedia dipasaran.
5. Mendapatkan keuntungan dari pembelian berdasarkan diskon kuantitas.
6. Memberikan pelayanan kepada pelanggan dengan tersedianya barang yang diperlukan.

Perusahaan yang memiliki jumlah persediaan yang besar memutuhkan biaya yang besar untuk mengatur persediaan yang ada. Persediaan yang besar akan mengakibatkan timbulnya dana menganggur yang besar, meningkatnya biaya penyimpanan, dan resiko kerusakan barang yang lebih besar. PSAK NO 14 menjelaskan bahwa biaya tambahan yang timbul akibat investasi perusahaan pada persediaan harus dikeluarkan dari biaya persediaan dan diakui sebagai biaya dalam periode terjadinya biaya. Dengan dikeluarkannya biaya tambahan dari persediaan dan diakui sebagai beban pada periode terjadinya biaya, maka dapat menyebabkan penurunan laba perusahaan ketika perusahaan mengalami penurunan laba, maka perusahaan akan membayar pajak lebih rendah sesuai dengan laba yang diterima oleh perusahaan.

### 2.1.7 Tingkat hutang perusahaan

Menurut Yuda Aditya Prakoso **”Leverage adalah banyaknya jumlah utang yang dimiliki perusahaan dalam melakukan pembiayaan dan dapat digunakan untuk mengukur besarnya aktiva yang dibiayai oleh hutang.”**<sup>21</sup>Hutang adalah sumber dana yang menimbulkan beban tetap keuangan, yaitu bunga yang harus dibayar tanpa memperdulikan tingkat laba perusahaan. Manajemen perusahaan harus dapat mengatur hutang dalam perusahaan yang tujuannya agar menguntungkan dan menghindari kerugian akibat timbulnya hutang.Hutang dapat dibagi menjadi dua yaitu hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang.Hutang jangka pendek adalah semua kewajiban yang harus dilunasi oleh perusahaan dalam kurung waktu maksimal satu tahun.Hutang jangka panjang adalah kewajiban yang dimiliki oleh perusahaan yang jangka waktu pelunasannya lebih dari satu tahun.

Pemilihan hutang dan modal sebagai sumber pendanaan merupakan keputusan penting yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan.Adanya biaya bunga pada hutang menjadi pertimbangan penggunaan hutang sebagai sumber pendanaan oleh perusahaan.Biaya bunga merupakan faktor pengurang pajak penghasilan sehingga dapat digunakan untuk menghemat pajak.

Hutang dalam perusahaan dapat dihitung dengan menggunakan rasio *leverage* atau tingkat hutang dalam perusahaan. Ada dua macam penghitungan rasio *leverage* yaitu *leverage* keuangan berdasar nilai buku diukur dengan rasio nilai buku seluruh hutang (*debt*= D) terhadap total aktiva(TA) sementara *leverage* keuangan berdasarkan nilai pasar diukur dengan rasio nilai buku seluruh hutang terhadap nilai pasar perusahaan (*total value* = V).

---

<sup>21</sup>**Ibid**,2018, hal. 14.

Rasio hutang dalam akuntansi dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Rasio Hutang

Rasio hutang merupakan gambaran dari total aset yang dimiliki oleh perusahaan yang dibiayai oleh hutang.

2. Rasio pengganda hutang

Rasio ini menggambarkan bagaimana menghitung hutang dengan melihat perbandingan dari aset dan ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan. Ketika aset perusahaan tidak bertambah tetapi jumlah ekuitas menurun, maka dapat disimpulkan bahwa adanya penambahan hutang untuk menyeimbangkan antara kepemilikan aset yang ada dan ekuitas yang tersedia di perusahaan.

**2.2 Peneliti terdahulu**

**Tabel 2.1**

**Penelitian Terdahulu**

| NO | PENELITI                         | JUDUL PENELITIAN  | VARIABEL YANG DIGUNAKAN   | HASIL PENELITIAN   |
|----|----------------------------------|---|---|--|
| 1. | Yuda Aditya<br>Prakoso<br>(2018) | Analisis faktor-factoryang mempengaruhi tarif pajak efektif pada wajib pajak badan (studi pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2016) | Variabel dependen yang digunakan yaitu tarif pajak efektif.<br><br>Variabel independen yang digunakan yaitu <i>leverage</i> , <i>profitabilitas</i> , intensitas aset tetap, dan perputaran persediaan. | Variabel <i>leverage</i> tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tarif pajak efektif. <i>Profitabilitas</i> dan intensitas aset tetap memiliki pengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif. |

|    |                     |   |  |   |
|----|---------------------|---|--|---|
|    |                     |   |  | Sedangkan, variabel perputaran persediaan memiliki pengaruh positif terhadap tarif pajak efektif.   |
| 2. | Septi Imelia (2013) | Analisis faktor yang mempengaruhi manajemen pajak dengan indikator tarif pajak efektif (studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011-2012) | Variabel dependennya yaitu manajemen pajak yang dapat diukur dengan tarif pajak efektif. Sedangkan variabel independennya yaitu ukuran perusahaan, <i>profitabilitas</i> , intensitas persediaan, intensitas aset tetap, tingkat hutang perusahaan, fasilitas perpajakan dan komisaris independen. | Ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif. <i>Profitabilitas</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif. Intensitas persediaan dan intensitas aset tetap tidak berpengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif. Tingkat hutang perusahaan berpengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif. Fasilitas perpajakan dan komisaris independen |

|    |                               |  |  |  |
|----|-------------------------------|--|--|--|
|    |                               |  |  | berpengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif.   |
| 3. | Achmad Zein<br>Ridlwan (2016) | Analisis faktor yang mempengaruhi manajemen pajak dengan indikator tarif pajak efektif (pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014) | Variabel dependennya yaitu manajemen pajak yang dapat diukur dengan tarif pajak efektif.<br>Variabel independennya yaitu ukuran perusahaan, komisaris independen dan <i>profitabilitas</i> .     | Ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel tarif pajak efektif. Komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap variabel tarif pajak efektif, dan <i>profitabilitas</i> berpengaruh signifikan terhadap variabel tarif pajak efektif. |
| 4. | Mia Meisiska<br>(2016)        | Analisis faktor yang mempengaruhi efektifitas pembayaran pajak pada wajib pajak badan.   | Variabel dependennya yaitu efektifitas pembayaran pajak.<br>Variabel independennya yaitu <i>Debt to Equity Ratio</i> , intensitas aset tetap, perputaran persediaan, dan <i>profitabilitas</i> . | <i>Debt to Equity Ratio</i> berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif, Intensitas aset tetap dan <i>profitabilitas</i> tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif. Sedangkan perputaran   |

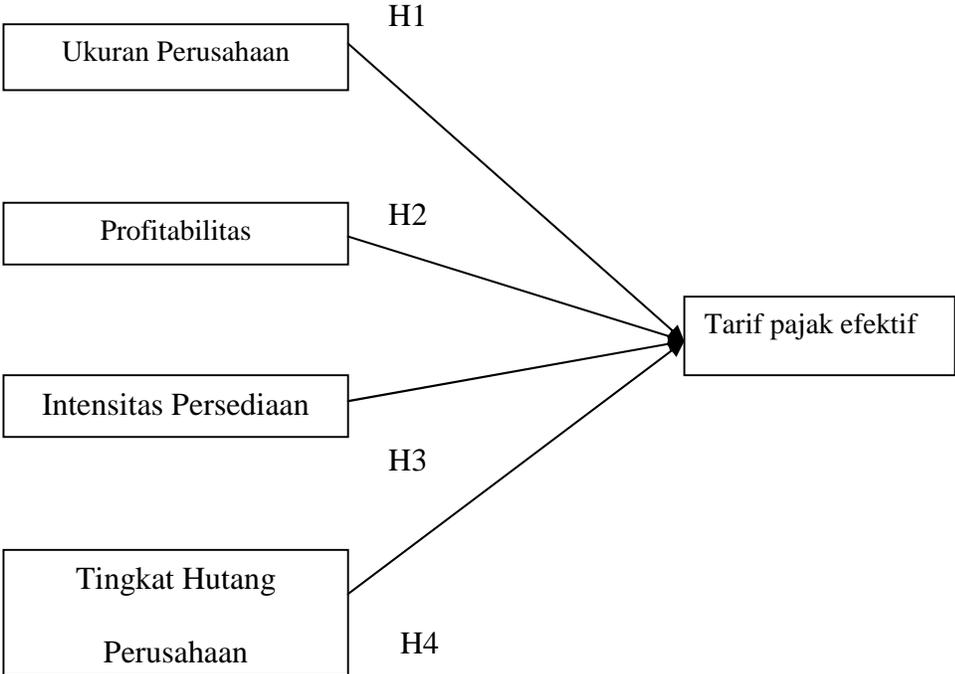
|    |                                |  |  |  |
|----|--------------------------------|--|--|--|
|    |                                |  |  | <p>persediaan berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif.</p>  |
| 5. | Iqbal Nul Hakim Darmadi (2013) | <p>Analisis faktor yang mempengaruhi manajemen pajak dengan indikator tarif pajak efektif (studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011-2012)</p> | <p>Variabel dependennya yaitu manajemen pajak.</p> <p>Variabel independennya yaitu ukuran perusahaan, tingkat hutang, profitabilitas, intensitas aset tetap, intensitas persediaan dan fasilitas perpajakan.</p> | <p>Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif. Tingkat hutang perusahaan berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif.</p> <p>Profitabilitas berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif. Intensitas persediaan aset tetap berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif.</p> <p>Intensitas persediaan berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif. Fasilitas perpajakan berpengaruh negatif terhadap tarif pajak</p> |

|  |  |  |  |          |
|--|--|--|--|----------|
|  |  |  |  | efektif. |
|--|--|--|--|----------|

### 2.3 Kerangka Penelitian

Perusahaan akan menggunakan manajemen pajak untuk menekan beban pajaknya agar tidak memberatkan keuangan perusahaan. Dengan adanya teori agensi, maka manajer sebagai agent berusaha untuk memaksimalkan laba perusahaan dengan membuat beban pajak menjadi kecil sehingga manajer akan mendapat kompensasi kinerja yang maksimal. Perusahaan akan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki oleh perusahaan untuk menekan beban pajak dan mengefektifkan manajemen pajaknya. Beberapa cara yang mungkin dilakukan oleh perusahaan adalah dengan memanfaatkan ukuran perusahaannya, memanfaatkan tingkat hutang perusahaan, memanfaatkan *profitabilitas* perusahaan, serta memanfaatkan intensitas persediaan. Berdasarkan penjabaran diatas, maka disusun kerangka penelitian pada gambar 2.1

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Penelitian**



## **2.4 Perumusan Hipotesis**

### **2.4.1 Pengaruh ukuran perusahaan terhadap tarif pajak efektif**

Perusahaan yang termasuk dalam perusahaan skala besar akan mempunyai sumberdaya yang melimpah yang dapat digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu. Berdasarkan teori keagenan, sumberdaya yang dimiliki oleh perusahaan dapat digunakan oleh manajer untuk memaksimalkan kinerja perusahaan. Perusahaan yang termasuk dalam perusahaan besar cenderung memiliki sumberdaya yang lebih besar dibandingkan perusahaan yang memiliki skala lebih kecil untuk melakukan manajemen pajak dan lobi politik. Sumber daya manusia yang ahli dalam perpajakan diperlukan agar manajemen pajak yang dilakukan oleh perusahaan dapat maksimal untuk menekan biaya pajak perusahaan. Menurut pendapat di atas memiliki arti bahwa perusahaan berskala kecil tidak dapat optimal dalam manajemen pajak dikarenakan kekurangan ahli dalam perpajakan. Ketika kegiatan manajemen pajak perusahaan tidak optimal akan menyebabkan hilangnya kesempatan perusahaan untuk mendapat *tax interactive* yang dapat mengurangi pajak yang dibebankan kepada perusahaan. Dari penjabaran di atas dapat diambil hipotesis bahwa:

**H1: Ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap tarif pajak efektif**

### **2.4.2 Pengaruh profitabilitas perusahaan terhadap tarif pajak efektif**

Profitabilitas merupakan suatu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tingginya nilai profitabilitas maka akan semakin bagus performa perusahaan tersebut sehingga *profitabilitas* menjadi faktor penting dalam pengenaan pajak penghasilan bagi perusahaan. Tingginya *profitabilitas* mengakibatkan jumlah pajak yang harus dibayar juga semakin meningkat karena perusahaan dianggap berhasil dalam mengelola kekayaan perusahaan dalam menghasilkan laba. Perusahaan yang memiliki *profitabilitas* yang

tinggi memiliki kesempatan untuk melakukan efektifitas pajak guna meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan. Penelitian Soepriyanto dalam Yuda Aditya Prakoso menjelaskan bahwa *profitabilitas* berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif, hal ini berarti apabila *profitabilitas* meningkat maka tarif pajak efektif mengalami penurunan karena akan dilakukan perencanaan pajak yang matang sehingga menghasilkan pajak yang optimal.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Iqbal Nul Hakim Darmadi bahwa *profitabilitas* berpengaruh positif tidak signifikan terhadap tarif pajak efektif. Hal ini mengindikasikan bahwa peran tingkat *profitabilitas* perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap manajemen pajak perusahaan. Namun melihat arah dari hasil penelitian, sesuai dengan hipotesis awal, hal ini dapat diterima. Semakin besar tingkat *profitabilitas* perusahaan maka akan semakin buruk manajemen pajak perusahaan. Indikator semakin buruknya manajemen pajak suatu perusahaan adalah meningkatnya tarif pajak efektif perusahaan. Dari uraian diatas didapat hipotesa ke dua yaitu:

**H2: Tingkat profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap tarif pajak efektif**

### **2.4.3 Pengaruh intensitas persediaan perusahaan terhadap tarif pajak efektif**

intensitas persediaan menggambarkan bagaimana perusahaan menginvestasikan kekayaan pada persediaan. Besarnya intensitas persediaan dapat menimbulkan biaya tambahan antara lain adanya biaya penyimpanan dan biaya yang timbul akibat adanya kerusakan barang. PSAK NO.14 mengatur biaya yang timbul atas kepemilikan persediaan yang besar harus dikeluarkan dari biaya persediaan dan diakui sebagai beban dalam periode terjadinya biaya. Biaya tambahan atas adanya persediaan yang besar akan menyebabkan penurunan laba perusahaan.

Dalam agensi teori, manajer akan berusaha meminimalisir beban tambahan karena banyaknya persediaan agar tidak mengurangi laba perusahaan. Disisi lain, manajer akan memaksimalkan biaya tambahan yang terpaksa ditanggung untuk menekan beban pajak. Cara yang akan digunakan manajer adalah dengan membebaskan biaya tambahan persediaan untuk menurunkan laba perusahaan sehingga dapat menurunkan beban pajak perusahaan. Dari uraian diatas di dapat hipotesa ke tiga yaitu:

**H3: Intensitas persediaan berpengaruh positif signifikan terhadap tarif pajak efektif**

#### **2.4.4 Pengaruh tingkat hutang perusahaan terhadap tarif pajak efektif**

Berdasarkan teori keagenan, hutang dapat digunakan oleh manajer untuk menekan biaya pajak perusahaan dengan memanfaatkan biaya bunga hutang. Jika biaya bunga hutang dapat digunakan untuk menekan beban pajak, maka ada kemungkinan manajer memilih menggunakan hutang untuk pendanaan guna mendapatkan *benefit* berupa biaya bunga hutang. Biaya bunga hutang yang timbul akan digunakan sebagai pengurang pajak sehingga dapat meningkatkan laba perusahaan. Ketika manajer dapat meningkatkan kinerja perusahaan, maka manajer akan mendapat keuntungan peningkatan kompensasi.

Biaya hutang yang timbul karena adanya hutang dapat menjadi faktor pengurang pajak. Peneliti terdahulu yang dilakukan oleh derashid dan zhang dalam Iqbal Nul Hakim Darmadi dijelaskan bahwa hutang perusahaan berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif yang menggambarkan bahwa hutang perusahaan dapat membantu mengurangi beban pajak perusahaan. Dari uraian diatas didapat hipotesa ke empat yaitu:

**H4: Tingkat hutang berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Objek Penelitian**

Dalam penelitian ini, telah dirumuskan beberapa hipotesis, untuk mendukung hipotesis yang dibuat, maka diperlukan lima variabel. Yaitu 4 variabel independen dan satu variabel

dependen. Menurut Sekaran dalam Dina Lisaumi “**variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi variable lain baik secara positif maupun negatif.**”<sup>22</sup> Variabel independen dalam penelitian ini adalah Ukuran perusahaan (X1), Profitabilitas (X2), Intensitas persediaan (X3), dan Tingkat hutang perusahaan (X4). Variabel dependen merupakan variabel yang menjadi perhatian utama peneliti. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah manajemen pajak.

### 3.2 Jenis dan sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang dibuat atau yang dikumpulkan oleh pihak luar. Data sekunder selanjutnya dilakukan proses analisis dan interpretasi terhadap data-data tersebut sesuai dengan tujuan penelitian. Data sekunder pada penelitian ini diperoleh dengan cara *download* laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdapat pada [www.idx.com](http://www.idx.com).

### 3.3 Populasi dan sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang berjumlah sebanyak 37. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian faktor yang mempengaruhi manajemen pajak adalah metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* dilakukan dengan mengambil sampel dari populasi berdasarkan suatu kriteria tertentu. Kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 2016-2017
2. Perusahaan yang mengalami laba selama dua Tahun berturut-turut (2016-2017)

---

<sup>22</sup> Dina Lisaumi, **Analisis Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Pajak (Studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2015)**, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Medan, 2017, hal. 37

Kriteria ini digunakan karena pajak penghasilan dikenakan kepada perusahaan yang mengalami laba.

3. Perusahaan manufaktur yang menerbitkan laporan keuangan secara lengkap. Kelengkapan laporan keuangan sangat diperlukan dalam penilaian variabel-variabel penelitian, sehingga perusahaan yang tidak lengkap laporannya tidak termasuk dalam sampel penelitian.
4. Perusahaan manufaktur tersebut tidak *delisting* selama periode pengamatan.
5. Menggunakan mata uang rupiah dalam penilaian laporannya.

Kriteria ini digunakan untuk pemilihan sampel karena sebagian besar perusahaan di Indonesia menggunakan mata uang rupiah dalam laporannya. Perusahaan yang menggunakan mata uang dollar dalam laporannya kurang mewakili keadaan perusahaan manufaktur di Indonesia.

Berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan diatas, maka sampel penelitian sebanyak :

**Tabel 3.1**  
**Daftar Sampel Penelitian**

| <b>No</b> | <b>Nama Perusahaan</b>          | <b>Kode<br/>Perusahaan</b> |
|-----------|---------------------------------|----------------------------|
| 1         | PT. WILMAR CAHAYA INDONESIA Tbk | CEKA                       |
| 2         | PT. DELTA DJAKARTA Tbk          | DLTA                       |
| 3         | PT. INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR  | ICBP                       |
| 4         | PT. INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk  | INDF                       |
| 5         | PT. MULTI BINTANG INDONESIA Tbk | MLBI                       |
| 6         | PT. MAYORA INDAH Tbk            | MYOR                       |

|    |   |      |
|----|---|------|
| 7  | PT. NIPPON INDOSARI CORPORINDO Tbk                                  | ROTI |
| 8  | PT. SEKAR BUMI Tbk  | SKBM |
| 9  | PT. ULTRA JAYA MILK INDUSTRY & TRADING<br>COMPANY Tbk               | ULTJ |
| 10 | PT. AKASHA WIRA INTERNATIONAL Tbk. d.h ades waters<br>Indonesia Tbk | ADES |
| 11 | PT. CHITOSE INTERNATIONAL Tbk                                       | CINT |
| 12 | PT. DARYA VARIA LABORATORIA   | DVLA |
| 13 | PT. GUDANG GARAM Tbk  | GGRM |
| 14 | PT. HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk                                   | HMSP |
| 15 | PT. KIMIA FARMA Tbk   | KAEF |
| 16 | PT. KEDAUNG INDAG CAN Tbk   | KICI |
| 17 | PT. KINO INDONESIA Tbk  | KINO |
| 18 | PT. KALBE FARMA Tbk   | KLBF |
| 19 | PT. MERCK Tbk   | MERK |
| 20 | PT. INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCUL Tbk                       | SIDO |
| 21 | PT. MANDOM INDONESIA Tbk  | TCID |
| 22 | PT. TEMPO SCAN PASIFIC  | TSPC |
| 23 | PT. UNILEVER INDONESIA Tbk  | UNVR |
| 24 | PT. WISMILAK INTI MAKMUR Tbk  | WIIM |

### 3.4 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional merupakan pengertian variabel (yang diungkap dalam definisi konsep) tersebut, secara operasional, secara praktik, secara nyata, dalam lingkup obyek penelitian/obyek yang diteliti. Definisi operasional dari masing-masing variabel tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Manajemen pajak

Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban pajak dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan manajemen. Manajemen pajak yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *proxy* tarif pajak efektif. Tarif pajak efektif dapat diukur dengan menggunakan rumus:

$$\text{Tarif pajak efektif} = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

Beban pajak dan laba sebelum pajak dalam penghitungan tarif pajak efektif merupakan beban pajak yang tercantum dalam laporan laba/rugi perusahaan. Beban pajak perusahaan yang tercantum dalam laporan keuangan adalah total pajak kini ditambah total pajak tangguhan.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup>Ibid, 2013, hal. 39

## 2. Ukuran perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan suatu pengklasifikasian sebuah perusahaan berdasarkan jumlah aset yang dimiliki oleh perusahaan. Penelitian ini menggunakan *proxy* total aset perusahaan untuk menentukan ukuran perusahaan. Untuk mengukur skala perusahaan dapat menggunakan rumus:

$$\text{Ukuran perusahaan} = \ln \text{Total Aset}$$

Total aset yang digunakan untuk mengukur ukuran perusahaan adalah total aset lancar dan total aset tidak lancar yang dimiliki perusahaan yang tercantum dalam neraca keuangan perusahaan.<sup>24</sup>

## 3. Profitabilitas

Definisi *profitabilitas* adalah ukuran untuk menilai efisiensi penggunaan modal dalam suatu perusahaan dengan membandingkan antara modal yang digunakan dengan laba operasi yang dicapai. Penelitian ini menggunakan *proxy Return On Assets (ROA)* untuk mengukur *profitabilitas* perusahaan. *Profitabilitas* dapat dihitung dengan cara:

$$ROA = \frac{\text{Laba sebelum pajak}}{\text{Total aset}}$$

Laba sebelum pajak yang digunakan dalam penghitungan rasio ROA adalah laba sebelum pajak yang tercantum dalam laporan laba/rugi perusahaan. Untuk total aset digunakan

---

<sup>24</sup>**Ibid**, hal. 40

total aset baik aset lancar maupun aset tidak lancar yang tercantum dalam neraca. Dasar penggunaan laba sebelum pajak yang digunakan untuk menghitung ROA adalah karena dengan menggunakan laba sebelum pajak, dapat diketahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang berasal dari aktivitas operasi tanpa terpengaruh keputusan investasi dan pajak.<sup>25</sup>

#### **4. Intensitas persediaan**

Intensitas persediaan merupakan cerminan dari seberapa besar perusahaan berinvestasi terhadap persediaan yang ada dalam perusahaan. Variabel intensitas aset tetap menggunakan proxy rasio intensitas persediaan. Rasio intensitas persediaan dapat dihitung dengan cara persediaan yang ada dalam perusahaan dibandingkan dengan total aset perusahaan. Melalui penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa intensitas persediaan dapat diukur dengan cara:

$$\text{Intensitas persediaan} = \frac{\text{Persediaan}}{\text{Total aset}}$$

Total aset dalam penghitungan intensitas persediaan menggunakan nilai total aset perusahaan yang tercantum dalam neraca perusahaan. Persediaan yang digunakan dalam penghitungan adalah persediaan yang tercantum dalam neraca.<sup>26</sup>

#### **5. Tingkat hutang perusahaan**

---

<sup>25</sup>**Ibid**, 2013, hal. 41

<sup>26</sup>**Ibid**, 2013, hal. 42

Definisi hutang adalah salah satu sumber pendanaan yang dapat digunakan perusahaan untuk membiayai pengeluarannya. Rasio hutang digunakan untuk menggambarkan total aset yang dibiayai oleh hutang. Hutang dalam penelitian ini diproyeksi dengan rasio hutang perusahaan. Rasio hutang dapat dihitung dengan cara membandingkan nilai buku seluruh hutang ( $debt = D$ ) dibagi dengan total aktiva. Berdasarkan penjelasan di atas, maka pengukuran tingkat hutang perusahaan dapat diukur dengan cara:

$$\text{Rasio hutang} = \frac{\text{Total hutang}}{\text{Total aset}}$$

Total hutang yang digunakan untuk menghitung rasio hutang adalah total hutang perusahaan yang tertera dalam neraca baik hutang jangka pendek dan jangka panjang. Total aset yang digunakan adalah total aset perusahaan baik aset lancar maupun aset tidak lancar sesuai dengan yang tertera dalam neraca keuangan perusahaan.<sup>27</sup>

### **3.5 Metode pengumpulan data**

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan studi pustaka dan dokumentasi.

1. Studi pustaka, yaitu dilakukan dengan cara membaca buku-buku atau jurnal didalam perpustakaan ataupun secara online yang dapat dijadikan referensi dalam penelitian ini.

---

<sup>27</sup>**Ibid**, 2013, hal. 40

2. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan, mencatat, dan mengkaji dokumen-dokumen tentang data keuangan seperti laba rugi dan neraca pada perusahaan manufaktur periode 2016-2017 yang diperoleh dari [www.idx.com](http://www.idx.com).

### 3.6 Metode analisis

Metode analisis data merupakan suatu metode yang digunakan untuk memproses variabel-variabel yang ada sehingga menghasilkan suatu hasil penelitian yang berguna dan memperoleh suatu kesimpulan. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian tersebut adalah sebagai berikut:

$$ETR = \beta_0 + \beta_1 UKPER + \beta_2 PROF + \beta_3 TINGHUT + \beta_4 INPERS + e$$

Keterangan:

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$  = Koefisien variabel independen

ETR = Tarif Pajak Efektif

UKPER = Ukuran Perusahaan

PROF = *Return On Assets*

INPERS = Intensitas Persediaan

TINGHUT = Tingkat Hutang

e = Error

#### 3.6.1 Uji kualitas data

Uji kualitas data dalam penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik digunakan untuk menguji apakah data yang telah dikumpulkan oleh peneliti

memiliki kualitas yang baik. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas data, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas. Jika data yang telah dikumpulkan sudah memenuhi seluruh kriteria asumsi klasik, maka data yang ada termasuk dalam kategori data yang baik.

### 3.6.2 Statistik deskriptif variabel

Menurut Imam Ghozali **“Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, dan varian.”**<sup>28</sup>

### 3.6.3 Uji regresi berganda

#### 3.6.3.1 Uji asumsi klasik

##### 1. Uji Normalitas Data

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel **pengganggu atau residual memiliki distribusi normal.**<sup>29</sup> Data yang baik adalah yang terdistribusi normal. Untuk mendeteksi normalitas dapat digunakan grafik normal P-P' plot. Data tersebut normal atau tidak dapat diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Jika data menyebar di atas garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

---

<sup>28</sup> Imam Ghozali, **Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25 EDISI 9:** Universitas Diponegoro, Semarang, 2018, hal. 19.

<sup>29</sup> **Ibid.**, 2018, hal. 161.

2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafiknya histogramnya tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Uji normalitas yang lain yang dapat digunakan adalah uji *kolmogorov smirnov*. *Level of significant* yang digunakan adalah 0,05. Jika nilai *p-value* lebih besar dari 0,05 maka data berdistribusi normal, begitu pula sebaliknya.

## 2. Uji Multikolineritas

Imam Ghozali menjelaskan bahwa **“uji multikolineritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen).”**<sup>30</sup> Kemiripan antar variabel independen dalam suatu model akan menyebabkan terjadinya korelasi yang sangat kuat antara satu variabel independen dengan variabel independen yang lain. Deteksi multikolinearitas pada suatu model dapat dilihat dari beberapa hal, antara lain:

1. Jika nilai *variance inflation factor* (VIF) tidak lebih dari 10 dan nilai *tolerance* tidak kurang dari 0,1 maka model dapat dikatakan terbebas dari multikolinearitas.
2. Jika nilai koefisien korelasi antar masing-masing variabel independen kurang dari 0,70 maka model dapat dinyatakan bebas dari asumsi klasik multikolineritas.

## 3. Uji Autokolerasi

---

<sup>30</sup>**Ibid**, 2018, hal. 107.

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (sebelumnya).<sup>31</sup>Cara mudah mendeteksi autokorelasi dapat dilakukan dengan uji Durbin-Watson. Mekanisme pengujian Durbin-Watson menurut

1. Merumuskan hipotesis  $H_0$ : tidak ada autokorelasi  $H_a$ : ada autokorelasi
2. Menentukan nilai  $d$  hitung (Durbin Watson)
3. Untuk ukuran tertentu dan banyaknya variabel independen, tentukan nilai batas independen ( $d_u$ ), dan batas bawah ( $d_l$ ), dari tabel.
4. Mengambil keputusan dengan kriteria, jika:
  - a.  $d < d_l$ ,  $H_0$  ditolak, berarti terdapat autokorelasi positif
  - b.  $d_l < d < d_u$ , daerah tanpa keputusan (*grey area*), berarti uji tidak menghasilkan kesimpulan (*inconclusive*).
  - c.  $d_u < d < 4 - d_u$ ,  $H_0$  diterima, tidak ada korelasi
  - d.  $4 - d_u < d < 4 - d_l$ , Daerah tanpa keputusan (*grey area*), berarti uji tidak menghasilkan kesimpulan (*inconclusive*).
  - e.  $d > 4 - d_l$ ,  $H_0$  ditolak, berarti terdapat autokorelasi positif.

#### 4. Uji Heteroskedastistas

Heteroskedastistas menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastistas dan

---

<sup>31</sup>**Ibid**, 2018, hal. 111.

jika berbeda disebut heteroskedastisitas.<sup>32</sup> Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas. Kebanyakan data *crosssection* mengandung situasi heteroskedastisitas karena data ini menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran (kecil, sedang, besar). Cara prediksi ada tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model dapat dilihat pada pola gambar *scatterplot* model tersebut. Gambar *scatterplot* menyatakan model regresi linear berganda tidak terdapat heteroskedastisitas jika:

- a. Jika titik data menyebar diatas dan dibawah atau disekitar angka 0
- b. Titik-titik data tidak mengumpul hanya diatas atau dibawah saja
- c. Penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali
- d. Penyebaran titik-titik data sebaiknya tidak berpola

### 3.6.3.2 Uji Model Regresi

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen.<sup>33</sup> Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

### 3.6.3.3 Uji Hipotesis

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen, dengan asumsi variabel lainnya

---

<sup>32</sup>Ibid,2018, hal. 137.

<sup>33</sup>Ibid,2018, hal. 97.

konstan. Jika *p-value* lebih kecil dari *level of significant* yang ditentukan, atau t-hitung lebih besar dari t-tabel berarti variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan pengujian dua arah sebagai berikut:

1. Membandingkan antara variabel t tabel dan t hitung
  - a. Bila  $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ , maka Hipotesis diterima atau variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen.
  - b. Bila  $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ , maka Hipotesis ditolak atau variabel independen secara individual tidak mempengaruhi variabel dependen.
2. Berdasarkan nilai signifikansi (sig)
  - a. Berdasarkan probabilitas jika probabilitas (signifikansi) lebih besar dari 0,05 maka variabel bebas secara individu berpengaruh terhadap efektifitas manajemen pajak.
  - b. Berdasarkan probabilitas jika probabilitas (signifikansi) lebih kecil dari 0,05 maka variabel bebas secara individu tidak berpengaruh terhadap efektifitas manajemen pajak.